



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

2019, ERP Diterapkan di Sudirman

JAKARTA - Kebijakan jalan berbayar secara elektronik atau *electronic road pricing* (ERP) di kawasan Sudirman-Bundaran HI akan diterapkan pada 2019 mendatang. Swedia dan Austria siap mengikuti proses lelang untuk membantu realisasi ERP.

Kemarin Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog dan Duta Besar Austria untuk Indonesia Helene Steinhäusel mendarangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menawarkan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta melalui ERP. Dua negaraitumemilikiperusahaan penyedia teknologi terbaik di dunia untuk mengatur lalu lintas. Mereka ingin berpartisipasi dalam tender internasional ERP yang kami lakukan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Helene maupun Johanna tidak sabar menunggu hasil lelang untuk mengimplementasikan kerjasama perusahaan Swedia-

Austria dalam mengatur kemacetan di Ibu Kota. Mereka yakin bila berkolaborasi dapat membangun transportasi kota yang berkelanjutan dan solusi mengatasi mobilitas warga. Uji coba pertama ERP akan dilakukan di Jalan Sudirman-Bundaran HI. "Kerja sama perusahaan antara Swedia dan Austria diyakini dapat membantu masalah kemacetan di Jakarta," kata Helene.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, perkembangan ERP saat ini tahap proses tender yang ditargetkan sudah ada pemenangnya pada Oktober mendatang. Adanya perusahaan kolaborasi Swedia-Austria

ini tentunya harus mengikuti tender yang prosesnya terbuka dan tidak mengacu pada teknologi tertentu. Terpenting taru dan manapun meng-capture bukan hanya nomor polisi kendaraan roda empat, tapi juga sepeda motor.

Dia berharap pemenang tender untuk pelaksanaan implementasi ERP adalah yang terbaik di dunia dan bisa diterapkan di Jakarta selingg kebijakan jalan berbayar secara elektronik ini dapat memecah permasalahan kemacetan di Jakarta. "ERP akan diimplementasikan di ruas pertama Sudirman-Bundaran HI di mana *mass rapid transit* (MRT) pada koridor tersebut sudah beroperasi. Untuk Bundaran HI-Medan Merdeka Barat menjadi tahap ERP selanjutnya karena ada pembangunan MRT Bundaran HI-Kampung Bandan. Untuk lelang difokuskan pada dua ruas jalan, yakni Sudirman dan Kuningan," paparnya.

Andri mengatakan, lelang ERP menggunakan kemakerjasama pembelian kembali jika sudah selesai dibayarkan. Lelang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jalan Berbayar Elektronik (JBE) yang berada di bawah Dinas Perhubungan.

Menurutnya, dalam rangka efisiensi penggunaan APBD un-

tuk suatu kebijakan yang membutuhkan investasi besar, BLUD diperbolehkan melakukan lelang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Hingga saat ini sebanyak 57 perusahaan swasta telah mendaftarkan diri di LPSE. Jakarta.go.id untuk mengikuti lelang yang ditentukan dalam tiga tahap penilaian. *Pertama*, kualitas perusahaan yang harus benar-benar mampu membangun ERP. *Kedua*, kemampuan keuangan perusahaan lantaran seluruh investasi pembangunan ditanggung perusahaan. *Ketiga*, evaluasi teknis dan harga melalui uji coba selang tiga bulan. "Kami didampingi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan lelang ini. Setelah pemenang ditemukan pembangunan segera dilakukan. Kalau pembangunan selesai kita beli dengan pinjaman uang dari bank dan cicil paling tiga tahun selesai. Operasinya di kita," ujar Andri.

Kepala Unit Pelaksana Teknis ERP Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, secara aturan ERP sudah ada di Peraturan Daerah Nomor 5/2013 yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) 2030. Selain mengadopsi dua ruas jalan yang cilelang yakni Sudirman dan Rasuna Said, Kuningan, dalam perda itu juga mengatur waktu pelaksanaan ERP yakni pukul 07.00-20.00 WIB. Sedangkan tarif yang diberlakukan bersifat dinamis (*selengkapnya lihat infografis*).

Menurut dia, jika kendaraan tidak menggunakan *on board unit* (OBU), kamera aplikasi langsung mendeteksi kemudi polisi melalui tilang elektronik akan menindaknya. "Ini juga memaksa Dinas Pelayanan Pajak (DPP) memutakhirkan data kendaraan. Korlantas juga akan memproses data kendaraan," ujarnya.

Untuk pembangunan *gate* dan pemasangan OBU sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan swasta melalui kerja sama yang memprioritaskan *standard operational procedure* (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM). "ERP tidak disubsidi. Ini pun ada aturannya. Jadi nanti penawarannya dari pihak investor. OBU berkisar Rp200.000. Dia melekat seperti nomor *handphone*. Tidak bisa digunakan kendaraan bukan miliknya," kata Zulkifli.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

2019, ERP Diterapkan di Sudirman

PERCEPAT REALISASI JALAN BERBAYAR

Pemprov DKI Jakarta terus mempercepat realisasi program *electronic road pricing* (ERP). Dua negara yakni Swedia dan Austria siap berpartisipasi dalam persaingan tender.

Jalan Berbayar

Investasi: Rp2,8 triliun

Peaksanaan:
Pukul 07.00-20.00 WIB

Tarif: Bersifat dinamis. Apabila mesin beryak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarif akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 km/jam.

Teknologi: *On Board Unit* (OBU) yang digunakan merakai sistem *one face*. Artinya, ketika kendaraan melewati kawasan ERP RO km/jam, secara otomatis OBU langsung terekam.

Lelang ERP

- Swedia dan Austria ingin berpartisipasi dalam tender internasional ERP. Dua negara itu memiliki perusahaan penyedia teknologi terbaik di dunia untuk mengatur lalu lintas.
- Saat ini sedang tahap lelang yang ditargetkan ada pemenangnya pada Oktober 2018. Lelang dilakukan untuk dua ruas jalan, yakni kawasan Sudirman dan Rasuna Said, Kuningan.
- Diharapkan teknologi ERP mampu meng-capture tidak hanya nomor polisi kendaraan roda empat, tapi juga sepeda motor.

Sumber: Kompas.com/Pemprov DKI Jakarta

Infrastruktur pembayaran: OBU (pembayar dan pembayarnya)

Penempatan gantry: Single gantry untuk akses masuk tol dan beberapa segmen-koridor

Deteksi pelanggaran: Kamera ANPR + DSRC

Sistem pembayaran: Hal-hal masuk ke akal tol dan membayar melalui *use tag*

Proses Lelang di: PTSE Jakarta (2018)

- Kualitas per-serta baru bayar-Ekonomis-pu-membangun ERP
- Kemampuan seluruh perusahaan
- Evaluasi teknis dan harga melalui uji coba selama tiga bulan